

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Jl Indrakila No. 42 Kabupaten Kebumen Telp/Faks (0287)381741 website: http;//www.pa-kebumen.go.id

Email: pakebumen@gmail.com

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/50
TGL. PEMBUATAN	:	3/1/2018
TGL. REVISI	:	12/31/2024
TGL. EFEKTIF	:	1/2/2025

NGA Disahkan Oleh,			
PENGADO.			
Yang Ariani, S.Ag., M.H.			
Ketua Pengadlan Agama Kebumen			

DOKUMEN MASTER	:	$\sqrt{}$				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	••		
DOKUMEN TIDAK	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
Dilarang menggandakan sebagian maupun
secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KEBUMEN



#### PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Jl.Indrakila No.42 Kebumen Telp/Fax (0287) 381741

Nomor Dokumen	:	SOP/AP/50
Tanggal Pembuatan	:	01/03/2018
Tanggal Revisi	:	31/12/2024
Tanggal Berlaku	:	02/01/2025
Disahkan Oleh	:	KETUA PA.KEBUMEN

## SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;</li> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:</li> </ol>	1.S1 Sederajat 2.SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengujian Konsekuensi	Daftar Informasi Publik Komputer dan kelengkapannya
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif	

#### PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

		Mutu Baku			Mutu Baku				
No.	Aktivitas	PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket	
1.	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi publik				Dokumentasi informasi publik		Dokumentasi informasi publik		
2.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy				Dokumentasi informasi publik	5 hari	Dokumentasi informasi publik, Draft dokumen dan arsip informasi publik		
3.	Membuat daftar dokumentasu dan arsip				Draft dokumen dan arsip informasi publik	kerja	Draft dokumen dan arsip informasi publik		
4.	Review atas dasar dokumentasi dan arsip	<b>+</b>			Daftar dokumen dan arsip informasi publik		Daftar dokumen dan arsip informasi publik		
5	Membuat persetujuan atas daar dokumentasi dan arsip informasi publik				Daftar dokumen dan arsip informasi publik		Daftar dokumen dan arsip informasi publik		